



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI**

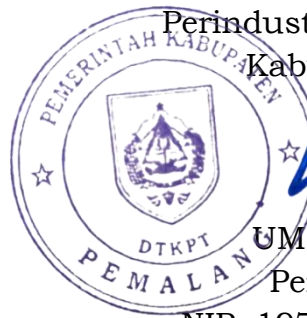
**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2027**

Jl. Surohadikusumo No. 6 Pemalang 52312 Telp. (0284)321278

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2027 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2027.

Kepala Dinas Tenaga Kerja,
Perindustrian dan Transmigrasi
Kabupaten Pemalang



UMRONI, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I

NIP. 19701224 199603 1 007

KATA PENGANTAR

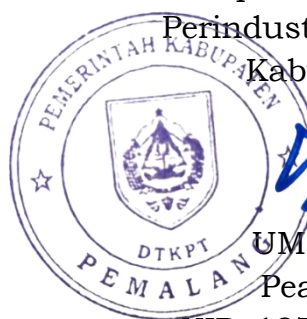
Dengan memanjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang telah menyelesaikan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2027. Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kami berharap Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2027 dapat digunakan sebagai acuan resmi bagi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang dalam menentukan prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun, dapat digunakan sebagai acuan resmi dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan dapat digunakan aparatur Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional selama 1 (satu) tahun.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2027 ini.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang tahun 2027 ini masih jauh dari sempurna untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan guna penyempurnaan laporan ini.

Kepala Dinas Tenaga Kerja,
Perindustrian dan Transmigrasi
Kabupaten Pemalang



UMRONI, S.H., M.H.

Peambina Tingkat I

NIP. 19701224 199603 1 007

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI..... iv

BAB I 1

PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Landasan Hukum 4

 1.3 Maksud dan Tujuan..... 5

 1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II..... 8

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU 8

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang..... 8

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 20

 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi 25

 2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD..... 26

 2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan..... 36

BAB III..... 40

TUJUAN DAN SASARAN 40

 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah 40

 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja 42

 3.3 Program , Kegiatan Dan Sub Kegiatan 43

BAB IV 55

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 55

BAB V..... 100

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN TENAGA KERJA..... 100

BAB VI 102

PENUTUP 102

L. RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan sebagai proses awal dari tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan mensyaratkan adanya perumusan alternatif keputusan yang cepat, tepat dan akuntabel. Kegiatan ini menjadi proses yang dibutuhkan karena keberhasilan dalam pencapaian tujuan pembangunan sangat bergantung kepada kualitas konsep perencanaan yang dilakukan. Dengan demikian sejauh mana ketersediaan sumber dana dan sumber daya aparatur dapat digunakan dalam mendukung program dan kegiatan dapat diprediksikan melalui asumsi yang mendasari konsepsi perencanaan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Tatacara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, **Rencana Kerja (Renja) SKPD** adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

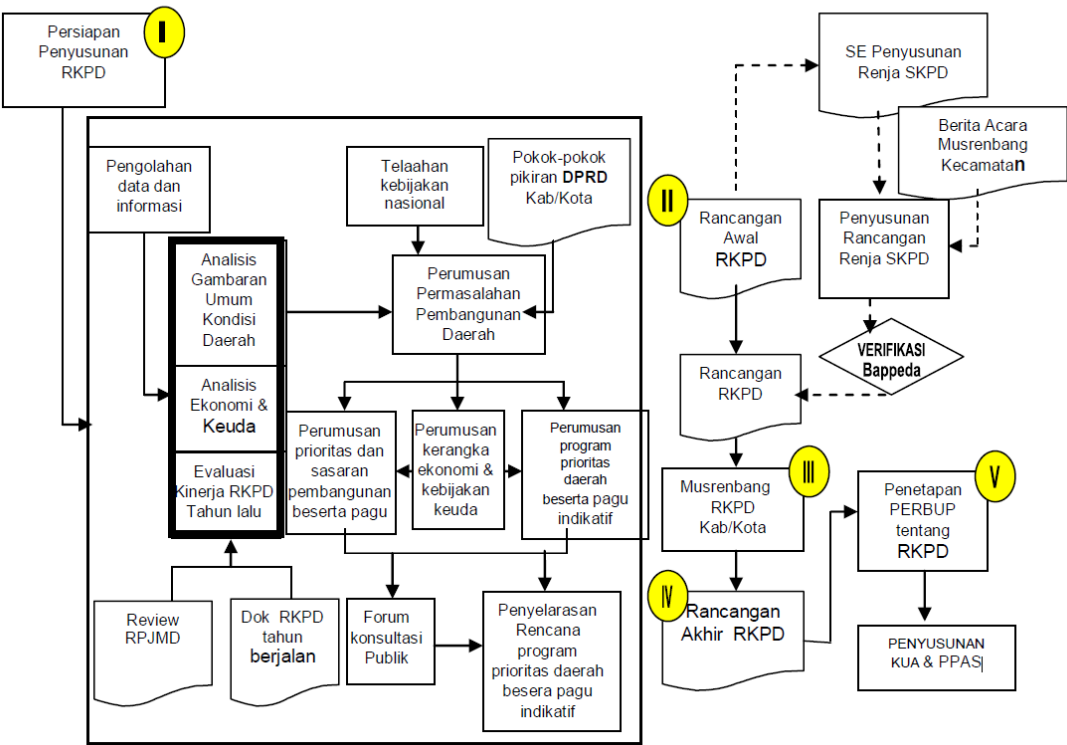
Sedangkan dalam Pasal 273 ayat (2),(3),(4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan menjadi bahan penyusunan rancangan

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Renja memuat program, kegiatan, lokasi, sasaran indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah RKPD ditetapkan.

Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan, yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra). Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Rencana Kerja OPD merupakan salah satu tahapan untuk menentukan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dokumen ini merupakan konsepsi perencanaan pembangunan yang berpedoman pada Renstra OPD.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah .

Gambar 1.1. Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD Kabupaten /Kota



Dasar penyusunan Rencana Kerja Tahun 2027 ini mengacu pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun

2025-2029 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029.

Adapun visi dan misi Bupati Pemalang Visi Bupati Pemalang adalah sebagai berikut :

“BERCAHAYA (BERSIH, CAKAP, HANDAL DAN MULYA).”

Sedangkan Misi Bupati Pemalang **RHAPSODI** :

1. RESIK

Artinya menciptakan budaya dan lingkungan yang bersih. Masyarakat Kabupaten Pemalang mempunyai budaya hidup bersih, kesadaran untuk mewujudkan lingkungan yang bersih sehingga kualitas udara, air dan tanah terjaga, termasuk pengelolaan sampah yang baik.

2. HIJAU

Artinya meningkatkan Kabupaten Pemalang yang sejuk dan nyaman melalui industri hijau yang berkelanjutan. Meningkatnya kualitas perekonomian dengan mendorong kontribusi sektor unggulan, mewujudkan ekonomi hijau yaitu pengelolaan pertanian dalam arti luas yang ramah lingkungan, industri hijau yang dapat mendorong sirkuler ekonomi, pariwisata yang ramah lingkungan dan UMKM yang mampu menjadi UMKM yang mampu mengolah sampah yang dihasilkan.

3. APIK

Mewujudkan Kabupaten Pemalang yang dikelola dengan baik dan ramah, menciptakan penataan wilayah dengan infrastruktur yang baik, pengelolaan pemukiman kumuh yang dilaksanakan mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.

4. PEDULI

Mewujudkan pemerintahan yang kuat, cerdas, peduli dan milik semua lapisan masyarakat, mewujudkan kualitas SDM dari sisi pendidikan dan kesehatan untuk menjadi SDM yang memiliki karakter dan berprestasi.

5. SILATURAHMI

Mewujudkan masyarakat yang rukun, guyub, gotong royong, tepa selira dan sejahtera. Pemerintah Kabupaten Pemalang meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan cara bergotong royong, saling menghormati dan tepa selira.

6. ORGANISATORIS

Mewujudkan Pemerintahan yang tertib, terstruktur, sistematis, melayani dan mengayomi. Dengan kata lain, Pemerintah Kabupaten Pemalang mewujudkan good governance, clean governance dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik.

7. DIGITALISASI

Memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangannya dalam memajukan kualitas masyarakat yang memiliki daya saing tinggi untuk menjadi generasi yang pintar. Pemerintah Kabupaten Pemalang mending terwujudnya digitalisasi atau penggunaan teknologi dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan dalam perwujudan reformasi birokrasi.

8. IKHLAS

Artinya menghadirkan kembali kehidupan spiritual, kearifan, bahasa dan budaya lokal masyarakat pemalang untuk semua kalangan. Pemerintah Kabupaten Pemalang mendorong terwujudnya kondisi yang nyaman dan aman dalam kehidupan spiritual, mengembangkan kearifan dan budaya lokal.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pegadaan Barang/Jasa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang kodefikasi, klasifikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 21 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang disusun sebagai acuan resmi bagi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang dalam menyusun program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Oleh karena itu Renja yang ada pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang dimaksudkan untuk :

1. menyediakan acuan resmi bagi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

2. menyediakan acuan resmi bagi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2027.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu dan terukur selama 1 tahun.
4. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional dalam 1 tahun.

Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi adalah :

1. Untuk mengukur capaian target kinerja pelayanan Perangkat Daerah;
2. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang;
3. Menciptakan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

- Latar Belakang memuat tentang Pengertian ringkas tentang Rencana Kerja, keterkaitan antara Rencana Kerja dengan Dokumen RKPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja Provinsi/Kab/Kota serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD;
- Landasan Hukum memuat tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta peraturan lainnya yang dijadikan pedoman dan acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;
- Maksud dan Tujuan memuat tentang Penjelasan terkait Maksud dan tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

- Sistematika Penulisan memuat tentang uraian pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja serta susunan garis besar isi Dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH berisi tentang telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja OPD, Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH berisi tentang target kinerja pelayanan Perangkat Daerah, Rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang berubah nomenklaturnya menjadi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi bertambah satu bidang Perindustrian yang semula bergabung dengan Dinas Koperasi, Perindustrian, UMKM dan Perdagangan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025, merupakan evaluasi terhadap capaian Rencana Kerja tahun 2025 (tahun n-2) dan capaian target Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 pada urusan wajib non pelayanan dasar Tenaga Kerja dan Urusan Pilihan Ketransmigrasian, dan realisasi program/kegiatan tahun 2026 yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja,Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang sebagai dokumen perencanaan disusun selama 1 tahun anggaran merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada akhir tahun anggaran, setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya. Dari hasil evaluasi rencana kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang yang berpedoman pada Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029, bahwa pada Tahun 2025, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang mendapat alokasi anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp. 12.172.556.834,00. yang terdiri dari 6 program, 16 kegiatan dan 45 sub kegiatan.

Pada tahun 2025 dari jumlah anggaran realisasi telah terserap sampai dengan akhir Deseember 2025 sebesar Rp. 11.398.256.509,00 sisa Rp. 774.300.325,00 berupa sisa perhitungan gaji dan efisensi anggaran.

Capaian sebesar 93,64 % tersebut menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar tenaga kerja dan urusan pilihan Perindustrian dan ketransmigrasian telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik.

Tabel 2.1

No.	Nama Program	Capaian Realisasi kinerja dan anggaran RKPD tahun 2025 (%)	
1	2	3	4
		K	Rp
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100	88,38
2.	Program Perencanaan Tenaga Kerja (RTK)	100	100
3.	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	116,36	99,58
		146,07	86,14
4.	Program Penempatan Tenaga Kerja	99,54	97,45
5.	Program Hubungan Industrial	128,43	98,94
6.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	66,67	76,91

Tabel 2.2

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL RENJA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI DAN PENCAPAIAN
RENSTRA DINAS TENAGA KERJA , PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PEMALANG
S/d Tahun 2025**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang

KODE REKENING	Urusan/Bidan g Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra- PD) Tahun 2029	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2025			Target program dan kegiatan (Renja-PD) Tahun 2026	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra- PD s/d Tahun 2026	
				Target Renja-PD	Realisasi Renja-PD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7=(6/5)	8	9	10=(9/8)
	Urusan Tenaga Kerja								
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	100	80	80	100,00%	100	0	0
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Prosentase tersusunnya Dokumen Rencana Tenaga Kerja Mikro dan Makro	100	1	1	100,00%	100	0	0

2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Prosentase Tenaga Kerja bersertifikat Kompetensi	4,05	5,50	6,40	116,36%	2,03	1,04	51,23
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Prosentase Pencari Kerja yang mengikuti pelatihan berbasis Kompetensi	78,66	78,66	78,14	99,34%	78,66	17,53	22,29
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Prosentase Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	NA	45,78	66,87	146,07%	NA	NA	NA
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Prosentase lembaga pelatihan kerja swasta yang terakreditasi	100	100	95	95,00%	100	0	0
2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Prosentase lembaga pelatihan kerja yang berijin	100	100	100	100,00%	100	0	0
2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Perusahaan Kecil yang mendapat Pembinaan Produktivitasnya	100	NA	NA	NA	100	0	0
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kab/Kota	Prosentase Persh yang diberikan Pembinaan	100	NA	NA	NA	100	0	0

		Pengukuran Produktivitasnya							
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Prosentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kab/Kota	75,26	72	71,67	99,54%	73,13	88,19	120,59
2.07.04.2.01	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari kerja yang ditempatkan	8000	10500	12904	122,90%	11000	1957	16,31
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang mengakses informasi bursa kerja	600	1000	1412	141,20%	1000	0	0
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kab/Kota	Prosentase Pekerja Migran Indonesia yang dilindungi	100	100	100	100,00%	100	0	0
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Prosentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang	100	26,35	33,84	128,43%	100	33,84	33,84

		layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)							
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Perusahaan yang mematuhi peraturan ketenagakerjaan	100	100	100	100,00%	100	28	28
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase perselisihan hubungan industrial perusahaan yang ditangani dan terbinanya perusahaan yang mengikuti jaminan sosial	100	100	100	100,00%	100	7,78	7,78
2.07.01	Program Penunjang	Prosentase Ketercapaian	100	100	100	100,00%	100	26,5	26,5

	Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja PD							
		Prosentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepeg. PD	100	100	100	100,00%	100	18,19	18,19
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan kinerja keuangan dan SDM yang mendukung kelanaran tugas dan fungsi OPD	100	100	100	100,00%	100	25	25
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase tersusunnya Dokumen Administasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	100	100	100	100,00%	100	28	28
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	100	NA	NA	NA	100	0	0

		yang dilaksanakan							
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100	100	100	100,00%	100	37,7	37,7
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	100	100	100	100,00%	100	0	0
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Operasional	100	100	100	100,00%	100	25	25
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase jumlah barang milik daerah yang terpelihara	100	100	100	100,00%	100	28,26	28,26
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Prosentase Sentra Industri Terbina	100	NA	NA	NA	100	11,11	11,11
		Pertambahan jumlah Industri Kecil dan Menengah	NA	6	1,58	26,33	NA	NA	NA

3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan perwilayahan Industri	10 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	100	10 Dokumen	2	11,11
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Prosentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait	100	NA	NA	NA	100	0	0
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan	NA	60	31,03	69,33	NA	NA	NA

		indikator pembangunan industri dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP)							
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2 Dokumen	0	0

		Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS							
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Prosentase tersedianya Informasi Industri secara lengkap, akurat dan terkini	100	100	100	100	100	50	50
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Unit Industri terdata dalam Sistem	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Dokumen	2	50
3.32.03	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Prosentase Transmigran yang ditempatkan	22,87	30	20	66,67%	11,83	0	0
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang ditempatkan	10 KK	1	1	100,00%	10 KK	0	0

Tabel 2.3
REALISASI PENDAPATAN
PERIODE SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2025

DINAS TENAGA KERJA

KODE REKENING	URAIAN PENDAPATAN	TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025			TARGET 2026	PERKIRAAN REALISASI TAHUN 2026	
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5=4/3*100%	6	6	8=6/7*100%
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	-	100.149.600	-	440.000.000	388.967.724	88,40%
	JUMLAH		100.149.600		440.000.000	388.967.724	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran umum terhadap pelayanan di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang tahun 2026 dapat kami sajikan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang

NO	Indikator	SPM / stand ar nasio nal/I KU	IKK	Renstra SKPD Target				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026 (triwulan 1)	Tahun 2027	Tahun 2028	
				(thn n-2)	(tnn n-1)	(thn n)	N+1	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	7	8	8		9	10	11	12	13
1.	Persentase tingkat pengangguran terbuka			6,89	6,33-6,04	6,05-5,75	5,76-5,46	6,61	-	6,05-5,75	5,76-5,46	
2.	TPAK	IKU		71,97	72,96	73,32	73,68	-	-	73,32	73,68	
2.	Persentase pengangguran yang ditangani	IKU		13,62	-	-	-	23,71	-	-	-	
3.	Indeks Ketenagakerjaan	IKU		30,85	-	-	-	37,3	-	-	-	
4.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja		IKK	80	100	100	100	100	-	100	100	
5.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		IKK	5,45	2,03	2,78	3,45	6,40	1,04	2,78	3,45	

NO	Indikator	SPM / stand ar nasio nal/I KU	IKK	Renstra SKPD Target				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026 (triwulan 1)	Tahun 2027	Tahun 2028	
				(thn n- 2)	(tnn n- 1)	(thn n)	N+1	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	7	8	8		9	10	11	12	13
6.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		IKK/ IKU	45,78	27,65	27,92	28,19	66,87	-	27,92	28,19	
7.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan		IKK	23,09	100	100	100	33,84	33,84	100	100	
8.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota		IKK	64,00	73,13	73,83	74,54	71,67	88,19	73,83	74,54	
9.	Persentase transmigran yang ditempatkan		IKK	30	-	-	-	20	-	-	-	
	Persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigran			-	11,43	14,3	20	-	0	14,3	20	
	URUSAN PERINDUSTRIAN											
	Rasio PDRB Industri Pengolahan		IKU	22,62	22,72	22,83	22,94	22,14	-	22,83	22,94	
	Prosentase Pertumbuhan IKM		IKU	6	6,50	6,60	6,70	1,58	-	6,60	6,70	

NO	Indikator	SPM / stand ar nasio nal/I KU	IKK	Renstra SKPD Target				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026 (triwulan 1)	Tahun 2027	Tahun 2028	
				(thn n- 2)	(tnn n- 1)	(thn n)	N+1	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	7	8	8		9	10	11	12	13
	Persentase sentra industri terbina			15	15	15	15	23		15	15	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait			-	10	10	10	-		10	10	
	Prosentase tersedianya informasi 22ndustry secara lengkap, akurat dan terkini			-	125	125	125	-		125	125	
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Indikator : persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin		IUP	-	-	-	-	57,88		-	-	

NO	Indikator	SPM / stand ar nasio nal/I KU	IKK	Renstra SKPD Target				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026 (triwulan 1)	Tahun 2027	Tahun 2028	
				(thn n- 2)	(tnn n- 1)	(thn n)	N+1	(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	7	8	8		9	10	11	12	13
	perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.											
	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kabupaten/kota Indikator : proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.		IUP	-	-	-	-	72,04		-	-	

Rencana Kerja Tahun 2027 merupakan penjabaran dari pelaksanaan RKPD Tahun 2025-2029. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, Dinas Tenaga Kerja berubah menjadi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi (DTKPT), bertambah satu bidang yaitu Bidang Perindustrian yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Ada beberapa indikator baru yang menjadi IKU dan IKK di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang. Indeks Ketenagakerjaan yang diperoleh dari Prosentase jumlah pelatihan bersertifikat Kompetensi + prosentase jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan + prosentase jumlah Hubungan Industrial dibagi dengan realisasi capaian 3 program. Capaian indikator ini didukung oleh 3 program yaitu program Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Hubungan Industrial. Tahun 2024 Disnaker Kabupaten Pemalang menargetkan indeks ketenagakerjaan sebesar 31% tercapai 34,50% (111,3%) yang merupakan hasil dari prosentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi sebesar 5,49 %, prosentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota sebesar 71,74% dan Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) sebesar 26,26%.

Prosentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi diperoleh dari Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi (1.564 orang) dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja keseluruhan (28.478 orang).

Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota diperoleh dari Jumlah pencari kerja (pencari kerja) yang ditempatkan (8.883 orang) dibandingkan dengan Jumlah pencari kerja yang terdaftar (12.381 orang)

Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) diperoleh dari Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (120 perusahaan) dibanding jumlah perusahaan Jumlah Perusahaan (457 perusahaan). Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Tenaga Kerja guna mengurangi angka pengangguran serta perlindungan tenaga kerja adalah sebesar 26,26%.

Indikator ini didukung oleh Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja,, Program Penempatan Tenaga Kerja, dan Program Hubungan Industrial.

Untuk Indikator Sasaran Pemerintah Daerah persentase tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2024 sebesar 6,63 mengalami kenaikan 0,08%. Jumlah penganggur sebesar 57.020 orang dibandingkan dengan

jumlah angkatan kerja sebesar 859.852 orang, hal ini disebabkan karena pertumbuhan jumlah angkatan kerja yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan lapangan pekerjaan, yang mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan ketersediaan pekerjaan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan yang masih dihadapi adalah :

1. Rendahnya kualitas dan ketrampilan tenaga kerja
2. Kualifikasi tenaga kerja yang tersedia belum sesuai/memenuhi syarat kebutuhan pasar kerja;
 - Sebagian besar perusahaan di Pematang Jaya bergerak dibidang garment yang membutuhkan skill sewing/menjahit sedangkan pencari kerja rata2/sebagian besar tidak menguasai ketrampilan tersebut.
 - Jurusan /program studi pada SMK di Kabupaten Pematang Jaya yang ada Jurusan Tata Busana, yang mencetak Calon TK berketrampilan sewing/menjahit;
 - Keinginan/minat pencari kerja yang cenderung bekerja di Jabodetabek.
3. Semua perusahaan sudah menerapkan UMK tetapi standar upah rendah sehingga banyak pekerja yang pindah ke daerah yang UMK nya tinggi;
4. Aturan Ketenagakerjaan belum diterapkan secara optimal;
5. Belum optimalnya pertumbuhan IKM, perkembangan klaster atau perkembangan sentra.

Solusi

1. Peningkatan pelatihan sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan;
2. Dalam rangka perluasan kesempatan kerja mengadakan kegiatan job fair, job canvassing dan Kerjasama dengan perusahaan yang membuka lowongan kerja;
3. Mengadakan sosialisasi, pembinaan dan money;
4. Berdasarkan Permenaker Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi, maka tenaga pelatih/instruktur yang dibutuhkan oleh BLK adalah instruktur yang memiliki kompetensi metodologi dan kompetensi teknis.
6. mengadakan pendekatan dengan dunia usaha/industry (perusahaan) di Kabupaten Pematang Jaya melalui perjanjian kerjasama supaya terbangun link dan match antara dunia pelatihan dan dunia kerja dan mengadakan kunjungan ke perusahaan khususnya garmen dalam rangka sinkronisasi kurikulum dan kompetensi bagi peserta pelatihan.

Sesuai kondisi permasalahan di atas, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kualitas produktivitas pencari kerja, peluang kesempatan kerja, penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan dinamis didukung dengan pengawasan dalam penegakan supremasi hukum ketenagakerjaan di Kabupaten Pematang Jaya yang dianggap belum maksimal,

juga berdasarkan isu-isu strategis maka perlu ditindak lanjuti dengan suatu rencana tindak lanjut berupa program dan kegiatan yang nyata yang didukung dengan penyiapan landasan-landasan teknis dan operasional secara bertahap dalam upaya pembangunan ketenagakerjaan, Perindustrian dan ketransmigrasian.

2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD

Tahun 2027 merupakan tahun kedua pelaksanaan kinerja dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029. Dengan adanya RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, diharapkan adanya konsistensi antar semua dokumen perencanaan.

Secara umum program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja sudah tertampung dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), termasuk usulan kegiatan yang berasal dari hasil musrenbang kecamatan hanya tidak semua program dan kegiatan dapat terdani sesuai dengan usulan yang ada dalam rancangan awal RKPD.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029, ada beberapa program prioritas dari Kepala Daerah yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Untuk Review Rancangan RKPD dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2027
Kabupaten Pemalang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	TARGET capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	TARGET capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	DTKPT Kab. Pemalang			8.075.913	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	DTKPT Kab. Pemalang			12.219.700.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DTKPT Kab. Pemalang	Nilai SAKIP IKM	70,6185,95	5.504.313	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	DTKPT Kab. Pemalang	Nilai SAKIP IKM	70,61		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DTKPT Kab. Pemalang	Persentase Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan Kinerja keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100	53.223	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DTKPT Kab. Pemalang	Persentase Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan Kinerja keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	100	188.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	TARGET capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	TARGET capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DTKP T Kab. Pemalang	Prosentase tersusunnya dokumen administrasi keuangan Perangkat daerah yang tepat waktu	100	4.637.259	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DTKPT Kab. Pemalang	Prosentase tersusunnya dokumen administrasi keuangan Perangkat daerah yang tepat waktu		5.233.500	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DTKP T Kab. Pemalang	Prosentase terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	100	20.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	DTKPT Kab. Pemalang	Prosentase terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan		80.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DTKP T Kab. Pemalang	Prosentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100	179.489	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DTKPT Kab. Pemalang	Prosentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran		412.500	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DTKP T Kab. Pemalang	Prosentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Perkantoran	100	35.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DTKPT Kab. Pemalang	Prosentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Perkantoran		105.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DTKP T Kab. Pemalang	Prosentase terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang operasional kantor	100	376.340	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DTKPT Kab. Pemalang	Prosentase terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang operasional kantor		570.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	TARGET capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	TARGET capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DTKP T Kab. Pemanang	Prosentase jumlah barang milik daerah yang terpelihara	100	203.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DTKPT Kab. Pemanang	Prosentase jumlah barang milik daerah yang terpelihara		315.000	
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	DTKP T Kab. Pemanang	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100 %	10.000	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	DTKPT Kab. Pemanang	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	80%	200	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	DTKP T Kab. Pemanang	Prosentase tersusunnya Dokumen Rencana Tenaga Kerja Mikro dan Makro	1	10.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	DTKPT Kab. Pemanang	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja yang telah disusun sesuai pedoman		200	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DTKP T Kab. Pemanang	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	2,78	804.220	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	DTKPT Kab. Pemanang	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	6,61	3.500.000	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	DTKP T Kab. Pemanang	Prosentase pencari kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi	78,66	749.220	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	DTKPT Kab. Pemanang	Prosentase pencari kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi		3.250.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	TARGET capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	TARGET capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	DTKP T Kab. Pemalang	Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang terakreditasi	100	25.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	DTKPT Kab. Pemalang	Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang terakreditasi		100.000	
	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	DTKP T Kab. Pemalang	Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja yang berizin	100	5.000	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	DTKPT Kab. Pemalang	Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja yang berizin		30.000	
	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	DTKP T Kab. Pemalang	Prosentase perusahaan kecil/UMKM yang meningkat produktifitasnya	100	5.000	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	DTKPT Kab. Pemalang	Prosentase perusahaan kecil/UMKM yang meningkat produktifitasnya		20.000	
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DTKP T Kab. Pemalang	Prosentase perusahaan yang diberikan pembinaan pengukuran produktifitas	100	20.000	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DTKPT Kab. Pemalang	Prosentase perusahaan yang diberikan pembinaan pengukuran produktifitas		100.000	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	DTKP T Kab. Pemalang	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	73,83	1.017.080	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	DTKPT Kab. Pemalang	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wil. kab/kota		1.095.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	DTKP T Kab. Pemalang	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	8000	937.080	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	DTKPT Kab. Pemalang	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan		720.000	
	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Lembaga penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang terfasilitasi dengan baik	NA	NA	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	DTKPT Kab. Pemalang	Prosentase Lembaga penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang terfasilitasi dengan baik		0	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	DTKP T Kab. Pemalang	Jumlah pencari kerja yang mengakses informasi bursa kerja	600	30.000	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	DTKPT Kab. Pemalang	Jumlah pencari kerja yang mengakses informasi bursa kerja		200.000	
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	DTKP T Kab. Pemalang	Prosentase Pekerja Migran Indonesia yang dilindungi	100	50.000	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	DTKPT Kab. Pemalang	Prosentase Pekerja Migran Indonesia yang dilindungi		175.000	
	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu)	DTKP T Kab. Pemalang	Prosentase perusahaan yang mematuhi peraturan penggunaan Tenaga Kerja Asing	NA	NA	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1	DTKPT Kab. Pemalang	Prosentase perusahaan yang mematuhi peraturan penggunaan Tenaga Kerja Asing	3 Perusahaan	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Daerah Kabupaten/Kota					(satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DTKPT Kab. Pemanang	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	100	250.000	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	DTKPT Kab. Pemanang	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	23,86	370.000	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	DTKPT Kab. Pemanang	Prosentase perusahaan yang mematuhi peraturan ketenagakerjaan	100	35.000	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	DTKPT Kab. Pemanang	Prosentase perusahaan yang mematuhi peraturan ketenagakerjaan		50.000	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan	DTKPT Kab.	Prosenatse perselisihan hubungan industrial perusahaan	100	215.000	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan	DTKPT Kab.	Prosenatse perselisihan hubungan industrial perusahaan yang		320.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pemalang	yang ditangani dan terbinanya perusahaan yang mengikuti jaminan social			Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pemalang	ditangani dan terbinanya perusahaan yang mengikuti jaminan social			
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	DTKP T Kab. Pemalang				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	DTKPT Kab. Pemalang				
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	DTKP T Kab. Pemalang	Persentase transmigran yang ditempatkan	14,3	30.000	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	DTKPT Kab. Pemalang	Persentase transmigran yang ditempatkan	20	350.000	
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	DTKP T Kab. Pemalang	Jumlah transmigran yang ditempatkan	10	30.000	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	DTKPT Kab. Pemalang	Jumlah transmigran yang ditempatkan	10	350.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN										

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	BIDANG PERINDUSTRIAN										
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DTKPT Kab. Pemanang	Prosentase Sentra Industri terbina	100	380.300	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	DTKPT Kab. Pemanang	Prosentase Sentra Industri terbina	100	485.000	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	DTKPT Kab. Pemanang	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	10	380.300	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	DTKPT Kab. Pemanang	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	10	485.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	DTKPT Kab. Pemanang	Prosentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait	100	30.000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	DTKPT Kab. Pemanang	Prosentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait	100	50.000	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin	DTKPT Kab. Pemanang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha	2	30.000	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan	DTKPT Kab. Pemanang	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau	2	50.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS			Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS			
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	DTKPT Kab. Pemanang	Prosentase tersedianya Informasi Industri secara lengkap, akurat dan terkini	100	50.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	DTKPT Kab. Pemanang	Prosentase tersedianya Informasi Industri secara lengkap, akurat dan terkini	100	50.000	
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	DTKPT Kab. Pemanang	Jumlah Unit Industri terdata dalam Sistem	3	50.000	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	DTKPT Kab. Pemanang	Jumlah Unit Industri terdata dalam Sistem	3	50.000	

2.5. Penelahaan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Salah satu tahapan dalam proses pembangunan daerah adalah melalui Forum SKPD. Forum ini cukup strategis karena mempertemukan kelompok masyarakat sektoral dan spasial. Dalam forum ini dilakukan penyelarasan usulan antara hasil-hasil musrenbang Kecamatan dengan rencana kerja SKPD, serta memberikan kesempatan kepada kelompok sektoral untuk memberikan masukan dan usulan kegiatan yang dinilai mampu mengatasi semua persoalan di semua sektor. Musrenbang dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai kabupaten.

Kajian terhadap program /kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat berdasarkan hasil musyawarah pembangunan daerah terdiri dari prioritas I dan 2 serta pokok pikiran DPRD. Prioritas 1 merupakan kegiatan hasil musrenbang yang jelas terdanai. Matriks Kegiatan Hasil Musrenbang dari Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pematang Jaya dapat dilihat pada tabel 2.4

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2027
Kabupaten Pemalang

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

1. Hasil Musrebang Kecamatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Simpur	Pelatihan Menjahit Untuk Pemberdayaan Masyarakat	30 Orang	
2		Karanganyar	Pelatihan Menjahit Untuk Pemberdayaan Masyarakat	1 paket	
3		Glandang	Pelatihan Menjahit Untuk Pemberdayaan Masyarakat	1 paket	
4		Sarwodadi	Pelatihan Menjahit Untuk Pemberdayaan Masyarakat	1 paket	
5		Kendaldoyong	Pelatihan Menjahit Untuk Pemberdayaan Masyarakat	30 Orang	

Tabel 2.7

2. Hasil Pokir DPRD

NO	PENGUSUL	FRAKSI	MASALAH	USULAN	LOKASI	MURNI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	LINDA DWI BHUANA PUTRI, S.H.	PDIP	Pelatihan membuat batik ecoprint desa Sikasur, Kecamatan Belik	Pelatihan berbasis kompetensi di UPTD Balai Latihan Kerja	desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kab. Pemalang	60.000.000
2	LINDA DWI BHUANA PUTRI, S.H.	PDIP	Pemberdayaan Perempuan melalui pelatihan pembuatan kue kering Desa Belik, Kecamatan Belik	Pelatihan berbasis kompetensi di UPTD Balai Latihan Kerja	Desa Belik, Kecamatan Belik , Kab. Pemalang	60.000.000
3	LINDA DWI BHUANA PUTRI, S.H.	PDIP	Pelatihan membuat Batik ecoprint Desa Bulakan Kecamatan Belik	Pelatihan berbasis kompetensi di UPTD Balai Latihan Kerja	Desa Bulakan, Kecamatan Belik, Kab. Pemalang	60.000.000
4	LINDA DWI BHUANA PUTRI, S.H.	PDIP	Pelatihan membuat kue kering Desa Sikasur kecamatan Belik	Pelatihan berbasis kompetensi di UPTD Balai Latihan Kerja	Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kab. Pemalang	60.000.000
5	DWI LAKSARI, S.Pd.	PDIP	Pelatihan menjahit untuk masyarakat desa Kejene, kec. Randudongkal	Pelatihan berbasis kompetensi di UPTD Balai Latihan Kerja	Desa Kejene, kecamatan Randudongkal, Kab. Pemalang	78.000.000
6	DWI LAKSARI, S.Pd.	PDIP	Pelatihan Perbengkelan las/las listrik fabrikasi untuk masyarakat Desa Kejene, Kecamatan Randudongkal	Pelatihan berbasis kompetensi di UPTD Balai Latihan Kerja	Desa Kejene, Kecamatan Randudongkal, Kab. Pemalang	79.000.000

7	DWI LAKSARI, S.Pd.	PDIP	Pelatihan berbasis kewirausahaan (tata boga) di Desa Kejene, wilayah kecamatan Randudongkal	Perluasan Kesempatan kerja (Pelatihan berbasis kewirausahaan)	Desa kejene, Kecamatan Randudongkal, Kab. Pemalang	58.000.000
8	SUBANDI SYUHADA	PKB	Perluasan Kesempatan kerja (Pelatihan berbasis kewirausahaan), Pelatihan penggunaan Alat Tangkap Ikan untuk pekerja migran indonesia	Perluasan Kesempatan kerja (Pelatihan berbasis kewirausahaan)	Jalan Yos Sudarso Kelurahan Widuri, Kecamatan Pemalang, Kab. Pemalang	150.000.000
9	Drs. HEPI PRIYANTO, M.M.	GOLKAR	Pelatihan Kerja (perbengkelan las/Las Listrik)	Pelatihan berbasis kompetensi di UPTD Balai Latihan Kerja	Kec. warungpring, Kab. Pemalang	100.000.000
						705.000.000

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra (Rencana Strategis) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang yang secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yaitu perencanaan program pembangunan Nasional. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang mendukung program Pembangunan Nasional diantaranya keterkaitan dengan penanganan Kemiskinan. Ada 7 (tujuh) Sub. Kegiatan yang mendukung Program Nasional terkait Penanganan Kemiskinan yaitu :

- a. Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi;
- b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
- c. Job Fair/Bursa Kerja;
- d. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan;
- e. Perluasan Kesempatan Kerja;
- f. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja;
- g. Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang juga mendukung tema Pembangunan Provinsi Jawa Tengah terkait Sertifikat Halal dimana Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang memiliki kewajiban hukum untuk memberikan pembinaan, pengawasan, serta fasilitasi aktif bagi para pelaku usaha, khususnya dalam skala industri mikro dan kecil. Kemudian melalui Bidang Perindustrian menetapkan skema fasilitasi yang dilaksanakan secara runtut, terpadu, dan berkesinambungan. Intervensi dinas diawali dengan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi secara masif guna menyamakan persepsi serta membangun kesadaran hukum pelaku industri mengenai pentingnya pemenuhan standar produk halal. Selanjutnya, memberikan fasilitasi pendampingan teknis secara intensif melingkupi penyusunan dokumen administrasi, kurasi bahan baku, hingga penyediaan tenaga Pendamping Proses Produk Halal (P3H) untuk memastikan ketertelusuran kehalalan produk. Tidak terbatas pada aspek administratif, Bidang Perindustrian juga memberikan pembinaan fisik terkait penataan tata letak (layout) ruang produksi industri kecil guna memenuhi standar higiene sanitasi baku sekaligus mencegah terjadinya kontaminasi silang dengan bahan-bahan non-halal di lingkungan kerja.

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang juga mendukung Program Unggulan Daerah terkait Penyediaan Lapangan Pekerjaan melalui Program Padat Karya. Padat Karya merupakan strategi penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat (miskin, pengangguran, setengah pengangguran dan sebagainya) melalui

program pembangunan pemerintah daerah yang mengutamakan penyerapan tenaga kerja sehingga tercapai penurunan pengangguran, kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Program pembangunan tersebut akan diarahkan pada proyek-proyek yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar, seperti : Pembangunan jalan/jembatan sederhana, revitalisasi saluran drainase, perbaikan saluran irigasi, bersihbersih sungai/saluran irigasi dan kegiatan yang sejenis lainnya.

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang juga memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung terwujudnya industri hijau dan ekonomi sirkular sebagai bagian dari arah pembangunan daerah yang berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025–2029. Sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Pemalang melalui semangat “Pemalang Bercahaya” dan misi pembangunan yang menekankan aspek lingkungan hidup, pemberdayaan ekonomi lokal, serta penguatan sektor unggulan daerah, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang berperan dalam mendorong transformasi industri menuju penerapan prinsip industri hijau dan ekonomi sirkular. Peran tersebut diwujudkan melalui pembinaan dan pendampingan industri kecil dan menengah (IKM), peningkatan penggunaan teknologi tepat guna, penguatan kapasitas sumber daya manusia industri, serta fasilitasi penerapan produksi bersih dan pengelolaan limbah yang lebih optimal. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang juga memiliki peran dalam membangun ekosistem industri yang saling terintegrasi melalui pemanfaatan bahan baku lokal, penggunaan kembali limbah produksi, pengembangan kemitraan usaha, serta penguatan rantai pasok antarwilayah dan antarpelaku usaha. Pendekatan ekonomi sirkular diharapkan mampu menciptakan efisiensi produksi, mengurangi dampak lingkungan, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Sedangkan Pembangunan RKPD Tahun 2027 memiliki tema dan prioritas ***”Mengembangkan potensi perekonomian melalui pembangunan pariwisata terintegrasi, industri bidang pertanian dan perikanan serta pengembangan UMKM”***

Tabel 3.1

Target sasaran makro pembangunan tahun 2027 pada RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029, meliputi:

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2025	Target 2027
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	72,49	76,87
2.	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	83,16	81,00
3.	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,63	3,82
4.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,80	6,60-6,99

5.	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	69,47	71,10
6.	Tingkat Kemiskinan	%	13,32	13,63-12,54
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,61	6,05-5,75

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Tujuan RPJMD adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029. Sedangkan tujuan Perangkat Daerah merupakan penjabaran Kewenangan yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Pembangunan jangka menengah Daerah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai. Tujuan merupakan suatu kondisi yang diharapkan dapat terwujud dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan atau pada saat masa Renstra Perangkat Daerah ini berakhir.

Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi, Kabupaten Pemalang mendukung 2 (dua) dari 4 (empat) tujuan RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2025-2029 yaitu :

- 1. Meningkatnya daya saing pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan;
 - 2. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat.
- Sedangkan tujuan Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi, Kabupaten Pemalang itu sendiri adalah “Meningkatnya kualitas penanganan pengangguran dan kontribusi industri dalam perekonomian daerah”.

Sasaran RPJMD adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Sedangkan sasaran Perangkat Daerah merupakan suatu kondisi jangka pendek yang harus diwujudkan guna mencapai tujuan yang dirumuskan. Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi, Kabupaten Pemalang mendukung 2 (dua) dari 6 (enam) Sasaran RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 yaitu :

- 1. Meningkatnya daya saing ekonomi daerah yang bertumpu pada potensi ekonomi lokal;
 - 2. Meningkatnya penanganan pengangguran.
- Adapun Sasaran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi kabupaten Pemalang adalah :
- 1. Meningkatnya jumlah Industri Kecil Menengah;
 - 2. Meningkatnya kualitas kompetensi, penempatan dan hubungan industrial.

Selanjutnya rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang akan tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.2

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2027
Meningkatkan kualitas Penanganan pengangguran dan kontribusi industri dalam perekonomian daerah	Tingkat Partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya Kualitas kompetensi, penempatan tenaga kerja dan hubungan industrial	Tingkat produktifitas tenaga kerja	27,92
		Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas perangkat daerah	• Indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh • Nilai sakisip	85,95 70
	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Meningkatnya jumlah industry kecil menengah	• Prosentase pertumbuhan industry kecil menengah (IKM)	6,60

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2027 yang diarahkan untuk peningkatan derajat sumber daya manusia berkualitas menuju Pemalang sejahtera, maka program dan kegiatan prioritas daerah selain dijabarkan ke dalam pelaksanaan urusan pemerintah juga ditekankan pada upaya-upaya antara lain : Peningkatan ketrampilan pencari kerja sesuai dengan kebutuhan pasar, penempatan tenaga kerja , peningkatan sarana BLK dan bursa kerja.

Dengan keluarnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah ada perubahan pada nomenkatur program dan kegiatan yang ditindaklanjuti Kepmendagri **900.1-2850** Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889.

Alasan mengambil Program dan Kegiatan sesuai Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 :

- 1. Keselarasan dengan Dokumen Perencanaan;
- 2. Prioritas Pembangunan Tahun 2027;
- 3. Program / kegiatan berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator kinerja utama (IKU) dan indikator program perangkat daerah;
- 4. Efektivitas dan Efisiensi Anggaran;
- 5. Dukungan terhadap Program Nasional/Provinsi;
- 6. Kegiatan yang diambil merupakan lanjutan dari program sebelumnya yang masih relevan dan membutuhkan penyelesaian atau penguatan di Tahun 2025

Rencana program dan Kegiatan dan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 adalah

- Urusan Tenaga Kerja :
 - I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA;
Kegiatan :
 - 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - II. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
 - 1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
 - III. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
 - 1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - 2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - 3. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
 - 4. Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
 - 5. Pengukuran Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja.
 - IV. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
 - 1. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - 2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - 3. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
 - V. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
 - 1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
 - VI. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
 - 1. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - VII. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
 - 1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - VIII. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
 - 1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan
 - IX. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

1. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

Rumusan rencana program dan kegiatan, indikator, penyebaran lokasi pelaksanaan kegiatan, target, indikatif anggaran serta prakiraan maju untuk tahun selanjutnya sebagaimana dalam tabel.

Tabel. 3.3

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Tahun 2027 dan Prakiraan Maju Tahun 2028
Kabupaten Pemalang**

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi (sesuaikan SE)

Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2028	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja PD	DTKPT Kab. Pemalang	100	5.504.313.000	DAU		100	6.549.178.740
		Prosentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepeg. PD	DTKPT Kab. Pemalang	100				100	

Ko de	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2028	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, laporan Kinerja keuangan dan SDM yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	DTKPT Kab. Pemalang	100	53.223.100	DAU		100	108.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase tersusunnya dokumen administrasi keuangan Perangkat daerah yang tepat waktu	DTKPT Kab. Pemalang	100	4.637.259.250	DAU		100	5.017.179.740
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan	DTKPT Kab. Pemalang	100	20.000.000	DAU		100	81.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan	DTKPT Kab. Pemalang	100	179.489.850	DAU		100	367.000.000

Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2028	
		administrasi perkantoran							
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Perkantoran	DTKPT Kab. Pemalang	100	35.000.000	DAU		100	135.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang operasional kantor	DTKPT Kab. Pemalang	100	376.340.800	DAU		100	548.147.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase jumlah barang milik daerah yang terpelihara	DTKPT Kab. Pemalang	100	203.000.000	DAU		100	231.352.000
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	DTKPT Kab. Pemalang	100	10.000.000	DAU		100	170.000.000
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Prosentase tersusunnya Dokumen Rencana	DTKPT Kab. Pemalang	100	10.000.000	DAU		100	170.000.000

Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2028	
		Tenaga Kerja Mikro dan Makro							
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	DTKPT Kab. Pemalang	2,78	804.220.000	DAU		3,45	1.499.010.510
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Prosentase pencari kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi	DTKPT Kab. Pemalang	78,66	749.220.000	DAU		78,66	1.478.319.780
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang terakreditasi	DTKPT Kab. Pemalang	100	25.000.000	DAU		100	17.466.730
	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Prosentase Lembaga Pelatihan Kerja yang berizin	DTKPT Kab. Pemalang	100	5.000.000	DAU		100	3.024.000
	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Prosentase perusahaan kecil/UMKM yang meningkat produktifitasnya	DTKPT Kab. Pemalang	100	5.000.000	DAU		100	100.000

Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2028	
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase perusahaan yang diberikan pembinaan pengukuran produktifitas	DTKPT Kab. Pemalang	100	20.000.000	DAU		100	100.000
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	DTKPT Kab. Pemalang	73,83	1.017.080.000	DAU		74,54	2.000.131.930
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	DTKPT Kab. Pemalang	10.000	937.080.000	DAU		8.000	1.420.303.930
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelayanan melalui informasi pasar kerja	DTKPT Kab. Pemalang	1.000	30.000.000	DAU		600	378.328.000

Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2028	
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pekerja Migran Indonesia yang dilindungi	DTKPT Kab. Pemalang	100	50.000.000	DAU		100	200.000.000
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	DTKPT Kab. Pemalang	100	250.000.000	DAU		100	2.961.595.700
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase perusahaan yang mematuhi peraturan ketenagakerjaan	DTKPT Kab. Pemalang	100	35.000.000	DAU		100	64.856.380

Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2028	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase perselisihan hubungan industrial perusahaan yang ditangani dan terbina perusahaan yang mengikuti jaminan sosial	DTKPT Kab. Pematang	100	215.000.000	DAU		100	2.896.739.320
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				490.300.000				996.989.320
	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase sentra industri terbina	DTKPT Kab. Pematang	100	380.300.000	DAU		100	892.390.320
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	DTKPT Kab. Pematang	10 Dokumen	380.300.000	DAU		10 Dokumen	892.390.320

Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2028	
	PROGRAM PENGENDALIAN IJIN USAHAN INDUSTRI KAB/KOTA	Prosentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industry (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	DTKPT Kab. Pemalang	100	30.000.000	DAU		100	37.673.000
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil fasilitasi verifikasi teknis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sector industry dan atau dalam rangka perluasan usaha untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah tinggi dan tinggi melalui SIINAS yang terintegrasi dengan system OSS	DTKPT Kab. Pemalang	2 Dokumen	30.000.000	DAU		2 Dokumen	37.673.000

Ko de	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2027				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2028	
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Prosentase tersediannya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	DTKPT Kab. Pemalang	100	50.000.000	DAU		100	54.548.000
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah unit industri terdata dalam sistem	DTKPT Kab. Pemalang	3 Dokumen	50.000.000	DAU		3 Dokumen	54.548.000
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase penempatan transmigrant terhadap animo transmigran	DTKPT Kab. Pemalang	14,3	30.000.000	DAU		20	12.378.000
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah transmigran yang ditempatkan	DTKPT Kab. Pemalang	10 KK	30.000.000	DAU		10 KK	12.378.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang tahun 2027 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029

Sesuai dengan pasal 273 (3) Rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Tenaga Kerja pada tahun 2027 melaksanakan 1 (satu) urusan wajib tenaga kerja dan dua urusan pilihan yaitu Perindustrian dan Transmigrasi yang terdiri dari program 9 program dan 22 kegiatan, sub kegiatan 52 sub kegiatan.

Tabel 4.1

4.1 Target Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga kerja, Perindustrian dan Transmigrasi :

Tujuan	Indikator KInerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatkan kualitas Penanganandan kontribusi industry dalam perekonomian daerah	Tingkat Partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya Kualitas kompetensi, penempatan tenaga kerja dan hubungan industri	Tingkat produktifitas tenaga kerja	27,92
		Meningkatnya kualitas perencanaan tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100
		Meningkatnya kualitas pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi	2,78
		Meningkatnya kualitas	Persentase Perusahaan yang	100

Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		hubungan industrial	menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	
		Meningkatnya kualitas penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan	73,83
		Meningkatnya kualitas pengelolaan transmigrasi	Persentase transmigran yang ditempatkan	14,3
		Meningkatnya kinerja pelayanan dan akuntabilitas perangkat daerah	• Indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh Nilai sakip	85,95 70
	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Meningkatnya jumlah industry kecil menengah	Prosentase pertumbuhan industry kecil menengah (IKM)	6,60
		Meningkatnya perencanaan dan Pembangunan industri	Persentase sentra industri terbina	15

Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
		Meningkatnya pengendalian izin usaha industri	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	10
		Meningkatnya pengelolaan sistem informasi industri nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	125
			TPAK Perempuan : Indikator Persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja	62,19

Tujuan	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
			atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.	
			Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kabupaten/kota : Indikator proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan	58,58

Tujuan	Indikator KInerja	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
			Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.	

Rumusan rencana kerja dan pendanaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2027 sebagaimana tabel terlampir :

Tabel. 4.2
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASIKAB. PEMALANG
TAHUN 2027

N O	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN			PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
								TARGE T 2027	PAGU INDIKATIF	PRIORIT AS DAERAH	TARG ET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)					(3)	(4)	(8)	(9)	(13)	(15)	(16)	(17)
						Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi			8.075.913.000,00			9.647.500.000,00	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.585.522.000,00			8.962.500.000,00	
	2	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			7.585.522.000,00			8.962.500.000,00	
1.	2	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			5.420.222.000,00			5.457.500.000,00	

						DAERAH KABUPATEN/KOTA							
							-	-	5.420.222.000,00		-	5.457.500.000,00	
	2	0	0	2.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			53.132.100,00			100.000.000,00	
		7	1	01									
						-			53.132.100,00			100.000.000,00	
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-		2.879.800,00		-	10.000.000,00	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		29.909.000,00		-	40.000.000,00	
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-		3.193.500,00		-	10.000.000,00	
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-		2.807.500,00		-	10.000.000,00	
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan	-		2.754.250,00		-	10.000.000,00	

						Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	4.636.200,00		-	10.000.000,00		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	6.951.850,00		-	10.000.000,00		
	2	0	0	2.	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		29.909.000,00			40.000.000,00		
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	29.909.000,00	P1. Pengembangan pembangunan pariwisata	-	40.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		2.754.250,00			10.000.000,00		
						Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	1 Dokumen	2.754.250,00	P1. Pengembangan	-	10.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja,

						Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			pembang unan pariwisat a			Perindust rian dan Transmig rasi
	2	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2.807.500,00			10.000.000,00	
		7	1	01	03								
						Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokume n	2.807.500,00	P1. Pengemba ngan pembang unan pariwisat a	-	10.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindust rian dan Transmig rasi
	2	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD			2.879.800,00			10.000.000,00	
		7	1	01	04								
						Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokume n	2.879.800,00	P1. Pengemba ngan pembang unan pariwisat a	-	10.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindust rian dan Transmig rasi
	2	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			3.193.500,00			10.000.000,00	
		7	1	01	05								
						Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokume n	3.193.500,00	P1. Pengemba ngan pembang unan	-	10.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindust rian dan

										pariwisata				Transmigrasi
	2	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4.636.200,00				10.000.000,00	
						Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	4.636.200,00	P1. Pengembangan pembangunan pariwisata	-		10.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2	0	0	2.	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.951.850,00				10.000.000,00	
						Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	6.951.850,00	P1. Pengembangan pembangunan pariwisata	-		10.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2	0	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.637.259.250,00				4.517.500.000,00	
						-			4.637.259.250,00				4.517.500.000,00	

						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	2.286.250,00		-	7.500.000,00		
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	5.000.000,00		-	10.000.000,00		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	4.629.973.000,00		-	4.500.000.000,00		
	2	0	0	2.	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		4.629.973.000,00			4.500.000.000,00		
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	4.629.973.000,00	P1. Pengembangan pembangunan pariwisata	-	4.500.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2.286.250,00			7.500.000,00		
		7	1	02	05								

						Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.286.250,00	P1. Pengembangan pembangunan pariwisata a	-	7.500.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			5.000.000,00			10.000.000,00	
						Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	5.000.000,00	P1. Pengembangan pembangunan pariwisata a	-	10.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2	0	0	2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			20.000.000,00			40.000.000,00	
						-			20.000.000,00			40.000.000,00	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	20.000.000,00		-	40.000.000,00	
	2	0	0	2.	00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			20.000.000,00			40.000.000,00	

						Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	20.000.000,00	P1. Pengembangan pembanguan pariwisata	-	40.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2	0	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah			179.489.850,00			327.500.000,00	
		7	1	06		-			179.489.850,00			327.500.000,00	
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	7.000.000,00		-	7.500.000,00	
							Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	-	8.489.850,00		-	20.000.000,00	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	90.000.000,00		-	180.000.000,00	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	50.000.000,00		-	75.000.000,00	
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	10.000.000,00		-	25.000.000,00	
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	-	7.000.000,00		-	10.000.000,00	

							Bangunan Kantor yang Disediakan							
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	7.000.000,00		-	10.000.000,00		
	2	0	0	2.	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7.000.000,00			10.000.000,00		
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	7.000.000,00	P1. Pengembangan pembangunan pariwisata a	-	10.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
	2	0	0	2.	00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			7.000.000,00			10.000.000,00		
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	7.000.000,00	P1. Pengembangan pembangunan pariwisata a	-	10.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi	
	2	0	0	2.	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			50.000.000,00			75.000.000,00		
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	50.000.000,00	P1. Pengembangan pembangunan	-	75.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian	

										unan pariwisat a				rian dan Transmig rasi
	2	0	0	2.	00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			10.000.000,00				25.000.000,00	
		7	1	06	05									
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	10.000.000,00	P1. Pengemba ngan pembang unan pariwisat a	-		25.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindust rian dan Transmig rasi
	2	0	0	2.	00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			7.000.000,00				7.500.000,00	
		7	1	06	06									
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokume n	7.000.000,00	P1. Pengemba ngan pembang unan pariwisat a	-		7.500.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindust rian dan Transmig rasi
	2	0	0	2.	00	Fasilitasi Kunjungan Tamu			8.489.850,00				20.000.000,00	
		7	1	06	08									
						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	8.489.850,00	P1. Pengemba ngan pembang unan pariwisat a	-		20.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindust rian dan Transmig rasi

	2	0	0	2.	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			90.000.000,00			180.000.000,00	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	90.000.000,00	P1. Pengemba ngan pembang unan pariwisat a	-	180.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindust rian dan Transmig rasi
	2	0	0	2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			35.000.000,00			90.000.000,00	
						-			35.000.000,00			90.000.000,00	
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	15.000.000,00		-	40.000.000,00	
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	20.000.000,00		-	50.000.000,00	
	2	0	0	2.	00	Pengadaan Mebel			15.000.000,00			40.000.000,00	
	.	7	1	07	05								
	0												
	7												
	.												
	0												
	1												
	.												
	2												
	.												
	0												
	7												

	.	0	0	0	5								
						Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	15.000.000,00	P1. Pengembangan pembangunan pariwisata	-	40.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2	0	0	2.	00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			20.000.000,00			50.000.000,00	
	.	7	1	07	06								
	0												
	7												
	.												
	0												
	1												
	.												
	2												
	.												
	0												
	7												
	.												
	0												
	0												
	0												
	0												
	6												
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	20.000.000,00	P1. Pengembangan pembangunan	-	50.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

									unan pariwisat a			rian dan Transmig rasi	
	2 . 0 7 . 0 1 . 2 . 0 8	0 7	0 1	2. 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			376.340.800,00			400.000.000,00	
						-			376.340.800,00			400.000.000,00	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		160.000.000,00		-	175.000.000,00	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		216.340.800,00		-	225.000.000,00	
	2 . 0 7 . 0 1	0 7	0 1	2. 08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			160.000.000,00			175.000.000,00	

	. 2 . 0 8 . 0 0 0 2												
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	160.000.000,00	P1. Pengembangan pembangunan pariwisata a	-	175.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2 . 0 7 . 0 1 . 2 . 0 8 . 0 0	0 7	0 1	2. 08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			216.340.800,00			225.000.000,00	

	2	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			113.000.000,00			150.000.000,00	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	113.000.000,00	P1. Pengembangan pembangunan pariwisata a	-	150.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2	0	0	2.	00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			40.000.000,00			50.000.000,00	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	40.000.000,00	P1. Pengembangan pembangunan pariwisata a	-	50.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2	0	0	2.	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			50.000.000,00			50.000.000,00	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000,00	P1. Pengembangan pembangunan	-	50.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan

										pariwisata				Transmig rasi
2.	2	0 7	0 2			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			5.000.000,00			12.500.000,00		
							-	-	5.000.000,00		-	12.500.000,00		
	2	0 7	0 2	2. 01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			10.000.000,00			12.500.000,00		
						-			10.000.000,00			12.500.000,00		
							Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	-	5.000.000,00		-	5.000.000,00		
							Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	-	5.000.000,00		-	7.500.000,00		
	2	0 7	0 2	2. 01	00 01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			5.000.000,00			5.000.000,00		
						Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokume n	5.000.000,00	P1. Pengemba ngan pembang unan pariwisata	-	5.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindust rian dan Transmig rasi	
	2	0 7	0 2	2. 01	00 03	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro			5.000.000,00			7.500.000,00		
						Terlaksananya fasilitasi penyusunan	Jumlah SDM Perusahaan yang	1 Orang	5.000.000,00	P1. Pengemba	-	7.500.000,00	Dinas Tenaga	

						Rencana Tenaga Kerja Mikro	mampu menyusun RTK Mikro			ngan pembangun pariwisata			Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
3.	2	0	0			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			774.220.000,00			1.215.000.000,00	
							-	-	774.220.000,00		-	1.215.000.000,00	
	2	0	0	2.		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			749.220.000,00			1.100.000.000,00	
						-			749.220.000,00			1.100.000.000,00	
							Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	-	25.000.000,00		-	100.000.000,00	
							Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-	724.220.000,00		-	1.000.000.000,00	
	2	0	0	2.	00	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota			25.000.000,00			100.000.000,00	
						Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	10 Unit	25.000.000,00	P1. Pengembangan	-	100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan

									pariwisata				Transmigrasi
	2	0	0	2.	00	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi			724.220.000,00			1.000.000.000,00	
						Terlaksananya Proses Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	160 Orang	724.220.000,00	P1. Pengembangan pembangunan pariwisata	-	1.000.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2	0	0	2.		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			25.000.000,00			50.000.000,00	
						-			25.000.000,00			50.000.000,00	
							Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	-	25.000.000,00		-	50.000.000,00	
	2	0	0	2.	00	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			25.000.000,00			50.000.000,00	
						Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20 Lembaga	25.000.000,00	P1. Pengembangan pembangunan pariwisata	-	50.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2	0	0	2.		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja			5.000.000,00			10.000.000,00	

						-		5.000.000,00			10.000.000,00		
						Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	-	5.000.000,00		-	10.000.000,00		
	2	0	0	2.	00	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi		5.000.000,00			10.000.000,00		
		7	3	03	01								
						Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	15 Perizinan	5.000.000,00	P1. Pengembangan pembangunan pariwisata	-	10.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2	0	0	2.		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil		5.000.000,00			20.000.000,00		
		7	3	04									
						-		5.000.000,00			20.000.000,00		
						Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	-	5.000.000,00		-	20.000.000,00		
	2	0	0	2.	00	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil		5.000.000,00			20.000.000,00		
		7	3	04	01								

						Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	3 Perusahaan	5.000.000,00	P1. Pengembangan pembangun pariwisata	-	20.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2	0	0	2.		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			20.000.000,00			35.000.000,00	
		7	3	05		-			20.000.000,00			35.000.000,00	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	-	20.000.000,00		-	35.000.000,00	
	2	0	0	2.	00	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja			20.000.000,00			35.000.000,00	
		7	3	05	01								
						Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	20.000.000,00	P1. Pengembangan pembangun pariwisata	-	35.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
4.	2	0	0			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			982.080.000,00			1.390.000.000,00	
		7	4										

							-	-	982.080.000,00		-	1.390.000.000,00	
	2	0	0	2.		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			937.080.000,00			1.290.000.000,00	
		7	4	01		-			937.080.000,00			1.290.000.000,00	
							Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	-	35.000.000,00		-	50.000.000,00	
							Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	-	35.000.000,00		-	40.000.000,00	
							Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	-	752.080.000,00		-	1.000.000.000,00	
							Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	-	115.000.000,00		-	200.000.000,00	
	2	0	0	2.	00	Pelayanan antar Kerja			115.000.000,00			200.000.000,00	
		7	4	01	02	Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	12000 Orang	115.000.000,00	P1. Pengemba ngan pembang unan pariwisat a	-	200.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindust rian dan Transmig rasi

	2	0	0	2.	00	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja			35.000.000,00			50.000.000,00	
						Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	350 Orang	35.000.000,00	P1. Pengembangan pembangunan pariwisata a	-	50.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2	0	0	2.	00	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan			35.000.000,00			40.000.000,00	
						Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	16 Orang	35.000.000,00	P1. Pengembangan pembangunan pariwisata a	-	40.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2	0	0	2.	00	Perluasan Kesempatan Kerja			752.080.000,00			1.000.000.000,00	
						Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	200 Orang	752.080.000,00	P1. Pengembangan pembangunan pariwisata a	-	1.000.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2	0	0	2.		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			30.000.000,00			200.000.000,00	
						-			30.000.000,00			200.000.000,00	

						Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	-	30.000.000,00		-	200.000.000,00		
	2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja		30.000.000,00			200.000.000,00		
						Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	1500 Orang	30.000.000,00	P1. Pengembangan pembangunan pariwisata	-	200.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		50.000.000,00			100.000.000,00		
						-		50.000.000,00			100.000.000,00		
							Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	-	50.000.000,00		-	100.000.000,00	
	2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		50.000.000,00			100.000.000,00		

						Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	20 Orang	50.000.000,00	P1. Pengembangan pembang unan pariwisata a	-	100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindust rian dan Transmig rasi
5.	2	0	0			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			250.000.000,00			370.000.000,00	
							-	-	250.000.000,00		-	370.000.000,00	
	2	0	0	2.		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			35.000.000,00			40.000.000,00	
						-			35.000.000,00			40.000.000,00	
						Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online		-	35.000.000,00		-	40.000.000,00	
	2	0	0	2.	00	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan			35.000.000,00			40.000.000,00	

						Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	20 Perusahaan	35.000.000,00	P1. Pengembangan pembangunan pariwisata	-	40.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2	0	0	2.		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			215.000.000,00			380.000.000,00	
						-			215.000.000,00			380.000.000,00	
							Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	-	10.000.000,00		-	30.000.000,00	
							Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	-	150.000.000,00		-	250.000.000,00	
							Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	-	25.000.000,00		-	50.000.000,00	
							Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-	30.000.000,00		-	50.000.000,00	

	2	0	0	2.	00	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			25.000.000,00			50.000.000,00	
						Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	15 Perkara	25.000.000,00	P1. Pengemba ngan pembang unan pariwisat a	-	50.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindust rian dan Transmig rasi
	2	0	0	2.	00	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi			10.000.000,00			30.000.000,00	
						Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	20 Asosiasi dan	10.000.000,00	P1. Pengemba ngan pembang	-	30.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindust

						Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi		Serikat Pekerja		unan pariwisata a			rian dan Transmigrasi
	2	0	0	2.	00	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota			150.000.000,00			250.000.000,00	
						Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	3 Lembaga	150.000.000,00	P1. Pengembangan pembangunan pariwisata a	-	250.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	2	0	0	2.	00	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja			30.000.000,00			50.000.000,00	
						Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	60 Orang	30.000.000,00	P1. Pengembangan pembangunan pariwisata a	-	50.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			490.391.000,00			685.000.000,00	

	3	3 1				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			460.391.000,00			625.000.000,00	
6.	3	3 1	0 2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			387.891.000,00			525.000.000,00	
							-	-	387.891.000,00		-	525.000.000,00	
	3	3 1	0 2	2. 01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			387.891.000,00			525.000.000,00	
						-			387.891.000,00			525.000.000,00	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	-	35.000.000,00		-	50.000.000,00	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	-	25.000.000,00		-	40.000.000,00	
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan	-	20.000.000,00		-	35.000.000,00	

							pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri							
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	-	307.891.000,00		-	400.000.000,00		
	3	3	0	2.	00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri			35.000.000,00			50.000.000,00		
						Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3 Dokume n	35.000.000,00	P1. Pengemba ngan pembang unan pariwisat a	-	50.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindust rian dan Transmig rasi	
	3	3	0	2.	00	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			20.000.000,00			35.000.000,00		
						Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan	5 Dokume n	20.000.000,00	P1. Pengemba ngan	-	35.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja,	

						Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			pembang unan pariwisat a			Perindust rian dan Transmig rasi
	3	3 1	0 2	2. 01	00 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			25.000.000,00			40.000.000,00	
						Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	5 Dokume n	25.000.000,00	P1. Pengemba ngan pembang unan pariwisat a	-	40.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindust rian dan Transmig rasi
	3	3 1	0 2	2. 01	00 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			307.891.000,00			400.000.000,00	
						Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Dokume n	307.891.000,00	P1. Pengemba ngan pembang unan pariwisat a	-	400.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindust rian dan Transmig rasi
7.	3	3 1	0 3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			22.500.000,00			25.000.000,00	

						-	-	22.500.000,00		-	25.000.000,00	
	3	3	0	2.		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota		22.500.000,00			50.000.000,00	
						-		22.500.000,00			50.000.000,00	
						-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-	16.000.000,00		-	25.000.000,00	

						Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-	6.500.000,00		-	25.000.000,00	
	3	3	0	2.	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi		16.000.000,00			25.000.000,00	
		1	3	01	03							

						kewenangan Kabupaten/Kota							
						Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	16.000.000,00	P1. Pengembangan pembangunan pariwisata	-	25.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	3	3 1	0 3	2. 01	00 04	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang			6.500.000,00			25.000.000,00	

					terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)							
					Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi	1 Dokumen	6.500.000,00	P1. Pengembangan pembangunan pariwisata	-	25.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

							kewenangan pemerintah pusat							
8.	3	3 1	0 4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			50.000.000,00				50.000.000,00	
							-	-	50.000.000,00		-		50.000.000,00	
	3	3 1	0 4	2. 01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			50.000.000,00				50.000.000,00	
						-			50.000.000,00				50.000.000,00	
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota	-		50.000.000,00		-		50.000.000,00	

							Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						
	3	3	0	2.	00	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			50.000.000,00			50.000.000,00	
						Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	3 Dokumen	50.000.000,00	P1. Pengembangan pembangunan pariwisata a	-	50.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	3	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			30.000.000,00			60.000.000,00	
9.	3	3	0			PROGRAM PEMBANGUNAN			30.000.000,00			60.000.000,00	

						KAWASAN TRANSMIGRASI							
							-	-	30.000.000,00		-	60.000.000,00	
	3	3	0	2.		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			30.000.000,00			60.000.000,00	
		2	3	01									
						-			30.000.000,00			60.000.000,00	
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-		10.000.000,00		-	25.000.000,00	
						Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	-		20.000.000,00		-	35.000.000,00	
	3	3	0	2.	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			10.000.000,00			25.000.000,00	
		2	3	01	01								
						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang	2 Laporan	10.000.000,00	P1. Pengemba ngan pembang unan	-	25.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindust rian dan

						Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			pariwisata			Transmigrasi
	3	3	0	2.	00	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			20.000.000,00			35.000.000,00	
						Terlaksananya Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	1 Kepala Keluarga	20.000.000,00	P1. Pengembangan pembangunan pariwisata	-	35.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
	J U M L A H								8.075.913.000,00			9.647.500.000,00	

Tabel 4.3
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASIKAB. PEMALANG
RENCANA PENDAPATAN TAHUN 2027

No.	Kode Rekening	Nama Kegiatan	Target Anggaran (Rp)	Jumlah TKA	Asumsi Dollar per 3 Juni 2026
1	4.02.03.008.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	644.940.000,-	30 orang	17.915,-

BAB V
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

Kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja standar yang ditetapkan. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan ditetapkan guna menajmin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Sejalan dengan penilaian akuntabilitas kinerja intansi pemerintah, maka indikator kinerja digunakan sebagai instrumen dalam pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Indikator kinerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, sejalan dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029.

Tabel 5.1
Indikator Kinerja Utama PD

No.	Indikator	Satuan	Target 2027	Realisasi 2025	
1	2	3	6	7	10
1.	TPT	%	6,04- 5,74	6,01-5,95	IUP
2.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan		59.69	60.94	IUP
3.	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kabupaten/ kota		57.32	57,95	IUP
4.	TPAK	%	73,32	73,68	IKU
5.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	27,92	28,19	IKU
6.	Persentase pertumbuhan Industri Kecil Menengah	%	6,6	6,7	IKU

Tabel 5.2
Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	2027	Realisasi 2025	
1	2	3	6	7	10
1.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	IKK
2.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	2,78	3,45	IKK
3.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan	%	73,83	74,54	IKK

	Antar Kerja dalam wilayah kab/kota				
4.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	100	100	IKK
5.	Persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigran	%	14,3	20	IKK
6.	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota	%	6,5	6,6	IKK
7.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	10	10	IKK
8.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Indeks	125	125	IKK

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang tahun 2027 disusun berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 dan mengacu pada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahun 2027.

1. Kaidah pelaksanaan yang perlu diatur dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2027 adalah sebagai berikut:
 - Sekretariat, bidang, dan jabatan fungsional pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang agar mendukung pencapaian Kinerja dalam Rencana Kerja 2027 dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Tahun 2027 dengan sebaik-baiknya.
 - Renja (Rencana Kerja) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang memuat sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih **indikatif** sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/anggaran yang tersedia.
 - Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang tahun 2027 ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKA maupun DPA untuk tahun yang akan datang.
2. Rencana Tindak Lanjut :
 - Penguatan Perencanaan Kinerja
 - a. Menyusun indikator kinerja yang **SMART** (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).
 - b. Menyelaraskan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, Perjanjian Kinerja).
 - c. Melakukan *review* target secara berkala agar realistis dan adaptif.
 - Peningkatan Kualitas SDM
 - a. Mengadakan pelatihan berbasis kebutuhan (teknis, manajerial, digital).
 - b. Penempatan pegawai sesuai kompetensi
3. Perbaikan Tata Kelola Anggaran
 - Menerapkan **anggaran berbasis kinerja**.
 - Memprioritaskan program yang berdampak langsung pada indikator kinerja.
 - Melakukan efisiensi anggaran untuk kegiatan yang kurang efektif.
4. Penguatan Koordinasi dan Kolaborasi
5. Penguatan Monitoring dan Evaluasi (Monev)
 - Melakukan evaluasi rutin (bulanan/triwulan).
 - Menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan.

6. Peningkatan Kualitas Data

- Memastikan data valid, akurat, dan terintegrasi.
- Menjadikan data sebagai dasar perencanaan dan evaluasi.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2027, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan yang ada dalam Renja.

Dalam pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2027 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya diperlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang Tahun 2027 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2027.

Kepala Dinas Tenaga Kerja,
Perindustrian dan Transmigrasi
Kabupaten Pemalang



UMRONI, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19701224 199603 1 007

**Form Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
Tahun 2027**

No.	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja.	Ada			
2.	Pengolahan data dan informasi.	Ada			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota.	Ada			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota.	Ada			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.	Ada			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota.	Ada			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	Ada			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	Ada			
9.	Perumusan kegiatan prioritas.	Ada			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	Ada			
	a.Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.	Ada			
	b.Mempertajam indikator dan target kinerja program	Ada			

	dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota.				
	c.Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	Ada			
	d.Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing- masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota.	Ada			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	Ada			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota.	Ada			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	Ada			
14.	Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah	Ada			

	kabupaten/kota yang telah disyahkan.				
--	---	--	--	--	--

Kepala Dinas Tenaga Kerja,
Perindustrian dan Transmigrasi
Kabupaten Pemalang



UMRONI, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19701224 199603 1 007